



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2018**

**KATA PENGANTAR**

Assamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,  
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijin-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Tahun Anggaran 2017 disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017 ini merupakan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2017 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten tahun 2012-2017.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Banten, kami sampaikan ucapan terimakasih. Semoga LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Januari 2018

**KEPALA BAPPEDA,**

**HUDAYA**

Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19580612 198503 1 017

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah,

karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau SKPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau SKPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan secara periodik. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaiannya secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

## 1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Hal Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2017.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program Yang Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2017 Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi Banten.
3. Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu Tahun Anggaran 2018.
4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.

### 1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
  11. Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
  12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;

#### 1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### 2.1.1 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  2. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;
  3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
- d. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

3. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
  2. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  3. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
  2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  3. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
  3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Jabatan Fungsional.

### 2.1.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten, maka:

#### **Kepala Badan**

Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan.

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan badan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Badan;
  - b. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang serta ketatausahaan Badan;
  - c. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - d. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian tataruang;
  - e. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan APBD provinsi;
  - f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
  - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan:
- a. Sekretaris;
  - b. Kepala Bidang Perekonomian;
  - c. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
  - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
  - g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
  - h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
  - i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
  - k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub-Bagian Keuangan;
  - c. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

#### **1. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
  - b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;

- c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
- g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- h. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset Badan;
- i. Melaksanakan fungsi kehumasan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

#### **B. Sub-Bagian Keuangan**

- (1) Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
  - b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
  - d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
- h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;
- k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.**

- (1) Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
  - b. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana program/kegiatan dan anggaran belanja Badan untuk sumber APBD maupun APBN;
  - d. Pengelolaan data SKPD;
  - e. Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  - f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;

- h. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
- i. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bidang Perekonomian**

- (1) Kepala Bidang Perekonomian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Melaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif dengan mitra bidangnya;
  - b. Melaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
  - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
  - d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja bidang;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
- d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
- e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:

- a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan
- c. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

#### **A. Sub Bidang Ketahanan Pangan**

- (1) Kepala Sub Bidang Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang ketahanan pangan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Ketahanan Pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan Sub bidang Ketahanan Pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Ketahanan Pangan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan**

- (1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
- e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **C. Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif**

- (1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **Bidang Sosial dan Pemerintahan**

- (1) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan dengan mitra bidangnya;
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan
  - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
  - d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Sosial dan Pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja bidang;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
  - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
  - d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
  - e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - f. Menyiapkan program bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
  - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
- Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

- Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan

#### **A. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial**

- (1) Kepala Sub Bidang Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Kesejahteraan Sosial;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Kesejahteraan Sosial;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **B. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan**

- (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;

- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Sub Bidang Tata Pemerintahan**

- 1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Pemerintahan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Pemerintahan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

**Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan mitra bidangnya;
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
  - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
  - d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja bidang;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
  - e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan

- Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- f. Menyiapkan program bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
  - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
  - b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah
  - c. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

**A. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral**

- (1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;

- e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
- f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **B. Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah**

- (1) Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Penataan Infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika**

- (1) Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Komunikasi dan

Informatika.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Komunikasi dan Informatika;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan**

- (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
  - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;

- d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
  - f. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;
  - h. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan ;
  - i. Pelaksanaan koodinasi evaluasi pembiayaan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja bidang;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
  - c. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;
  - e. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran pembangunan dan program pembangunan;
  - f. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - g. Menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;
  - h. Melaksanakan penilaian usulan rencana kerjasama pendanaan pembangunan;

- i. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan dokumen perencanaan bentuk kejasama pendanaan pembangunan;
  - j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses perencanaan program dan anggaran pembangunan;
  - k. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - l. Menyiapkan program bidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
  - m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
  - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
  - c. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

#### **A. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan dan penganggaran program pembangunan;
- e. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- h. Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan provinsi dan nasional;
- i. Melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;
- j. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi Banten;
- k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;

- d. Menyiapkan bahan analisa terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas APBD dan APBN;
- e. Menyiapkan program bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan penyiapan Perjanjian Kinerja tahunan
- i. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian dan Evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
- l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai pengembangan pembiayaan pembangunan ;

- e. menyiapkan bahan kajian kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Penelitian dan Pengembangan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyiapan data dan informasi pembangunan;
  - b. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Pengembangan inovasi daerah
  - d. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja bidang;
  - b. Menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan standar pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. Menyusun rencana, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
  - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan umum dan pemerintahan daerah mencakup bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;

- e. Menyelenggarakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan;
  - f. Membina dan mengembangkan kualitas SDM aparatur, kelembagaan dan jaringan penelitian dan pengembangan daerah;
  - g. Menyelenggarakan sosialisasi, diseminasi dan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  - h. Melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah;
  - i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan
  - b. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
  - c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

#### **A. Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan daerah dalam bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian;
  - d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;

- e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **B. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi**

- (1) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengembangan inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi, serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian;
  - d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

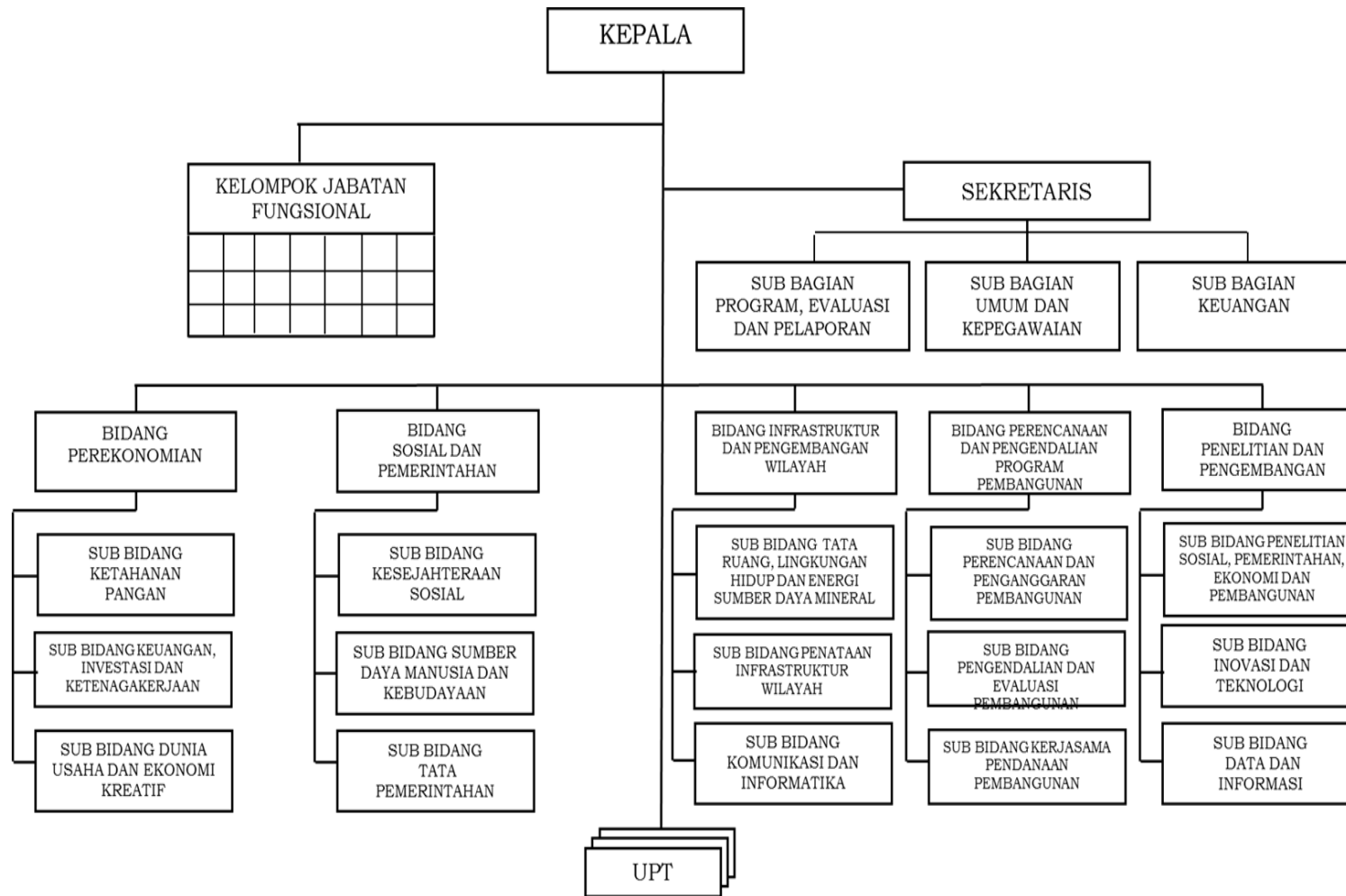
### **C. Sub Bidang Data dan Informasi**

- (1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang data dan informasi pembangunan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan Daerah;
  - c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan Daerah;
  - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data pembangunan Daerah;

- e. Melaksanakan pelayanan informasi berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;
- f. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder dan publik melalui Sistem Informasi dan publikasi data pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yaitu Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti dan Fungsional Analis Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
- (4) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (6) Pejabat Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. RPJMD PROVINSI BANTEN

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2007 – 2012 dengan memperhatikan agenda dan prioritas pembangunan nasional (RPJMN), serta komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kesejahteraan masyarakat merupakan harapan dan aspirasi serta keinginan luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten.

Periode tahun 2007-2012, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah **“BERSATU MEWUJUDKAN RAKYAT BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat Banten sejahtera.

Keberhasilan pencapaian sasaran agenda pembangunan melalui pencapaian indikator kinerja pada masing – masing agenda, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam visi – misi pembangunan 5 (lima) tahun yang ditetapkan. Sehingga dalam tahun 2017 ini, target pencapaian Indikator Makro Pembangunan (IMP) adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 75,13 %;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,8 – 6,9 %;
3. Prosentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 4,9 – 4,7%;
4. Prosentase Pengangguran Terbuka yang ditargetkan sebesar 8,74 %.

### 2.2. RENCANA STRATEGIS

Bappeda Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten, handal, professional dan

memiliki integritas, sarana dan prasarana yang memadai, kerangka regulasi serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan misi Bappeda Provinsi Banten yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017.

**Visi** merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Peran Bappeda Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah Provinsi Banten pada urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dalam kurun waktu tahun 2012-2017 maka **Bappeda Provinsi Banten** menetapkan **Visi Tahun 2012-2017** adalah:

**“PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN DAERAH”**

**Makna** yang terkandung dalam Visi Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

**1. Profesional.**

- a. Mampu dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dilandasi oleh kerangka regulasi dan ketentuan organisasi;

- b. Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten;
- c. Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
- d. Melahirkan dokumen produk perencanaan pembangunan daerah yang terukur, jelas dan terpercaya.
- e. Produk dokumen yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- a. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang bermutu dan akuntabel;
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berdasarkan hasil pelaporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan tahapan dan proses secara terkoordinasi dengan memperhatikan pendekatan partisipatif dan *Bottom up Planning*.

Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut dapat menjadi pilar utama dalam aspek perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu:

**“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.**

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi yang sarasanya secara operasional akan dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, khususnya Misi Keempat dan Misi Kelima maka Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 “**Profesional Dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Implemetatif**”, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) **Misi Bapeda Provinsi Banten 2012-2017** sebagai berikut.

1. **Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.**
2. **Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.**
3. **Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**
4. **Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.**

#### **A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI BANTEN**

**Tujuan** adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan **Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

**1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.**

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
- b. Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.
- b. Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah yang diukur dari (indikator):
  - 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala

bidang sebagai pendukung dalam penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.

2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah.

**2. Misi 2 : Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.**

Tujuannya adalah:

Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Sasarannya adalah:

Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya LKPJ, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan.

**3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Tujuannya adalah:

Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.

Sasarannya adalah:

Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya Dokumen data statistik dan data spasial.

**4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.**

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.
- b. Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana yang diukur dari (indikator):
  - 1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.
- b. Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan yang diukur dari (indikator):
  - 1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan.
  - 2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah.
  - 3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.
  - 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan**  
**Pembangunan Daerah Provinsi Banten**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
<b>Misi 1:</b> <b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.</b>	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.	RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
	Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.	Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah.	1) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai pendukung dalam penyusunan RPJMD, RKPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
			dan KUA-PPAS.. 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah.	-	-	-	-	-
<b>Misi 2: Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.</b>	Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.	LKPJ, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
<b>Misi 3: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.</b>	Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.	Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.	Dokumen data statistik dan data spasial.	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.</b>	Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2) Rasio ketersediaan dokumen	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
			Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.					
	Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan. 2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah. 3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur. 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%

### 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Guna menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah 2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2012-2017.

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017, pada tahun 2016 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4 (empat) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 24 (dua puluh empat) Indikasi Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2017.

Adapun program yang diarahkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
3. Pengendalian Pembangunan Daerah
4. Kerjasama Pembangunan Daerah
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (3 dok)
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

- a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (100%)
3. Pengendalian Pembangunan Daerah
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (100%)
4. Kerjasama Pembangunan Daerah
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah (3 Dok)
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
  - a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (100%)
  - b. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
  - a. Capaian Program : Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
  - b. Capaian Program : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (100%)
  - c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (100%)
  - d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (100%)
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
  - a. Capaian Program : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (41 paket)

kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah
4. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata
5. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis
6. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah
7. Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban
8. Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan
9. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender
10. Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan
11. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD
12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya
13. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
14. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Pembayaran Kewajiban TA. 2015)
15. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
16. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
17. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
21. Peningkatan Kapasitas Aparatur
22. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
23. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
24. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

## 2.4. Anggaran per kegiatan

Anggaran kegiatan pada tahun 2017, sebagai berikut :

1	2	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	7	8
1		<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>	807.750.000,00	720.750.000,00
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	107.750.000,00	96.700.000,00
	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	700.000.000,00	624.050.000,00
2		<b>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>	15.840.988.000,00	18.867.653.900,00
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.442.100.000,00	3.455.800.000,00
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.556.760.000,00	2.387.460.000,00
	3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6.994.957.000,00	8.331.067.400,00
	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	389.171.000,00	172.564.000,00
	5	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	3.290.600.000,00	4.353.362.500,00
	6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	167.400.000,00	167.400.000,00
33		<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</b>	14.333.141.500,00	15.204.944.500,00
	1	Penyusunan Dokumen APBD	2.736.401.000,00	2.050.034.000,00
	2	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	6.777.641.000,00	6.837.559.000,00
	3	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	450.000.000,00	450.000.000,00
	4	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	625.776.500,00	725.776.500,00
	5	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial	600.000.000,00	633.300.000,00
	6	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan	797.200.000,00	1.797.200.000,00
	7	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	414.120.000,00	368.810.000,00
	8	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika	365.725.000,00	269.324.000,00
	9	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	600.000.000,00	1.276.425.000,00
	10	Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan	966.278.000,00	796.516.000,00
34		<b>Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	2.650.130.000,00	2.874.361.000,00
	6	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2.040.130.000,00	1.804.410.000,00
	7	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	610.000.000,00	1.069.951.000,00
35		<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>	628.980.000,00	736.600.000,00
	5	Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan	628.980.000,00	736.600.000,00
48		<b>Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan</b>	725.660.000,00	825.660.000,00
	4	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	725.660.000,00	825.660.000,00
69		<b>Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK</b>	2.843.687.000,00	3.399.387.000,00
	1	Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan	1.994.687.000,00	2.760.767.000,00

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
72	2 Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	849.000.000,00	638.620.000,00
	<b>Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>	1.034.804.500,00	1.050.000.000,00
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1.034.804.500,00	1.050.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		38.865.141.000,00	43.679.356.400,00

### 2.5. Tolok Ukur Dan Target Kinerja

Rencana Tolok Ukur Kinerja tahun 2017 kegiatan Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja		
Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3				
<b>Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)</b>	<b>3</b>				
	1 Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	2 Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	2 Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	3 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah	1 Dokumen	3 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	4 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	4 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	5 Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	1 Dokumen	5 Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	96
	6 Sosialisasi Revisi RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030	1 Dokumen	6 Sosialisasi Revisi RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030	1 Dokumen	1 Dokumen	97

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
	7	Penyusunan Tematik Perencanaan Pembangunan Berbasis Spasial	1 Dokumen	7	Penyusunan Tematik Perencanaan Pembangunan Berbasis Spasial	1 Dokumen	100
	8	Rapat Koordinasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Banten	1 Dokumen	8	Rapat Koordinasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Banten	1 Dokumen	93
	9	Rapat Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten	1 Dokumen	9	Rapat Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten	1 Dokumen	100
	10	Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	10	Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	100
Perencanaan pembangunan;							
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100%				
<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</b>							
	1	Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	1 Dokumen	1	Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	1 Dokumen	99
	2	Rapergub Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Provinsi Banten Tahun 2018	1 Dokumen	2	Rapergub Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Provinsi Banten Tahun 2018	1 Dokumen	97
	3	Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2018	1 Dokumen	3	Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2018	1 Dokumen	100
	4	Pelatihan Dan Penyusunan Data E-Musrenbangnas SKPD Provinsi Dan Kab/Kota Tahun 2018	1 Dokumen	4	Pelatihan Dan Penyusunan Data E-Musrenbangnas SKPD Provinsi Dan Kab/Kota Tahun 2018	1 Dokumen	99
	5	Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi Banten Tahun 2018	43 Dokumen Renja SKPD	5	Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi Banten Tahun 2018	43 Dokumen Renja SKPD	88
	6	Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Provinsi Banten Tahun 2017	43 Dokumen Renja SKPD	6	Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Provinsi Banten Tahun 2017	43 Dokumen Renja SKPD	56

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
	7	Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	43 Dokumen Renja SKPD	7	Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	43 Dokumen Renja SKPD	100
	8	Verifikasi Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018	1 Dokumen	8	Verifikasi Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018	1 Dokumen	0
	9	Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2018	1 Dokumen	9	Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2018	1 Dokumen	100
	10	Rapergub Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	10	Rapergub Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	94
	11	Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11	Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4
	12	Sosialisasi Pergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten	1 Dokumen	12	Sosialisasi Pergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten	1 Dokumen	100
	13	Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022	1 Dokumen	13	Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022	1 Dokumen	93
	14	Musrenbang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	1 Dokumen	14	Musrenbang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	1 Dokumen	101
	15	Penyusunan Pergub Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	15	Penyusunan Pergub Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	33
	16	Penyusunan SOP Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan	1 Dokumen	16	Penyusunan SOP Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan	1 Dokumen	100
	17	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Ta. 2018	1 Dokumen	17	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Ta. 2018	1 Dokumen	4
	18	Verifikasi DRPK SKPD Provinsi Dan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA. 2018	2 Dokumen	18	Verifikasi DRPK SKPD Provinsi Dan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA. 2018	2 Dokumen	94
	19	Verifikasi Data E-Musrenbang SKPD Provinsi Dan Kab/Kota Ta. 2018	1 Dokumen	19	Verifikasi Data E-Musrenbang SKPD Provinsi Dan Kab/Kota Ta. 2018	1 Dokumen	100
	20	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) Perubahan Ta. 2017	30 Orang	20	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) Perubahan Ta. 2017	30 Orang	85

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%		
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja				
	2 1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2018	30 Orang	2 1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2018	30 Orang	61	
	2 2	Pengembangan Aplikasi E-DRPK (E-PLANNING)	1 Dokumen	2 2	Pengembangan Aplikasi E-DRPK (E-PLANNING)	1 Dokumen	100	
	2 3	Evaluasi Rapergub RKPD Kabupaten/Kota	8 Dokumen	2 3	Evaluasi Rapergub RKPD Kabupaten/Kota	8 Dokumen	100	
				2 4	Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	95
				2 5	Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen	60
<b>Penyusunan Dokumen APBD</b>		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)</b>						
	1	Penyusunan Dokumen P-APBD TA. 2017 dan APBD TA.2018	2 Dokumen	1	Penyusunan Dokumen P-APBD TA. 2017 dan APBD TA.2018	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	2	Sosialisasi RKA SKPD P-APBD 2017 dan APBD TA. 2018	2 Dokumen	2	Sosialisasi RKA SKPD P-APBD 2017 dan APBD TA. 2018	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	3	Penyusunan RAPERGUB Penjabaran P-APBD TA. 2017	1 Dokumen	3	Penyusunan RAPERGUB Penjabaran P-APBD TA. 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	4	Penyusunan RAPERGUB Penjabaran APBD TA. 2018	1 Dokumen		Penyusunan RAPERGUB Penjabaran APBD TA. 2018	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan</b>		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)</b>						
	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	1 Dokumen	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	3	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	1 Dokumen	3	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	4	Evaluasi Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 Bidang Perekonomian	1 Dokumen	4	Evaluasi Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	5	Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	1 Dokumen	5	Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
	6	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 Dokumen	6	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 Dokumen	100
	7	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA)	1 Dokumen	7	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA)	1 Dokumen	100
	8	Pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten	1 Dokumen	8	Pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten	1 Dokumen	100
	9	Sosialisasi Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten	1 kegiatan	9	Sosialisasi Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten	1 kegiatan	100
	10	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Tahun 2017	1 Dokumen	10	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Tahun 2017	1 Dokumen	100
				11	Penyusunan Kajian KLHS RZWP3K Provinsi Banten	1 Dokumen	100
				12	Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi Banten	1 Dokumen	0
<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif</b>		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)</b>					
	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	100
	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	100
	3	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	1 dokumen	3	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	1 dokumen	100
	4	Pengembangan Agribisnis	1 dokumen	4	Pengembangan Agribisnis	1 dokumen	100
	5	Koordinasi Pengendalian Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	1 dokumen	5	Koordinasi Pengendalian Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	1 dokumen	100
	6	Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Agrobisnis Koridor Tol Serang - Panimbang	1 dokumen	6	Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Agrobisnis Koridor Tol Serang - Panimbang	1 dokumen	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja		
	7	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Lingkup Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif Tahun 2017 1 dokumen	7	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Lingkup Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif Tahun 2017 1 dokumen	1 dokumen	100
<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan</b>		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)</b>				
	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan 1 dokumen	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan 1 dokumen	1 dokumen	100
	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan 1 dokumen	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan 1 dokumen	1 dokumen	100
	3	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah 1 dokumen	3	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah 1 dokumen	1 dokumen	100
	4	Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Tematik Perekonomian Tahun 2017 1 dokumen	4	Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Tematik Perekonomian Tahun 2017 1 dokumen	1 dokumen	100
	5	Penyusunan Penganggaran SPM Bidang Perekonomian 1 dokumen	5	Penyusunan Penganggaran SPM Bidang Perekonomian 1 dokumen	1 dokumen	100
	6	Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan 1 dokumen	6	Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan 1 dokumen	1 dokumen	100
	7	Pengendalian dan Perkembangan KPI 1 dokumen	7	Pengendalian dan Perkembangan KPI 1 dokumen	1 dokumen	100
	8	Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan tahun 2017 1 dokumen	8	Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan tahun 2017 1 dokumen	1 dokumen	100
<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah</b>		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)</b>				
	1	Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 1 Dokumen	1	Koordinasi Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 1 Dokumen	1 Dokumen	100
	2	Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Tahun 2018 2 Dokumen	2	Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Tahun 2018 2 Dokumen	2 Dokumen	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%		
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja				
	3	Koordinasi Program AMPL / PPSP	2 Dokumen	3	Koordinasi Program AMPL / PPSP	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	4	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah Tahun 2017	5 Dokumen	4	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah Tahun 2017	5 Dokumen	5 Dokumen	100
	5	Koordinasi Bidang Sumber Daya Air	2 Dokumen	5	Koordinasi Bidang Sumber Daya Air	2 Dokumen	2 Dokumen	100
				6	Rapat Koordinasi Progres Proyek Strategis Nasional Di Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				7	Penyusunan Rencana Aksi Penataan kawasan Kesultanan banten Lama	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika</b>		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)</b>						
	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	3	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional - Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi	1 Dokumen	3	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Nasional - Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	4	Rapat Verifikasi Renja SKPD Tahun 2017 Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	4	Verifikasi Renja SKPD Tahun 2017 Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	5	Perencanaan, Pemntapan dan Pengintegrasian Penerapan e-Government	1 Dokumen	5	Perencanaan, Pemantapan dan Pengintegrasian Penerapan e-Government	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	6	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Lingkup Subid Komunikasi dan Informatika Tahun 2017	1 Dokumen	6	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Lingkup Subid Komunikasi dan Informatika Tahun 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	7	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	7	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
			8	Roadmap Pembangunan Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)</b>					
	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	2	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	3	Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Tahun 2018	3	Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Tahun 2018	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	4	Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	4	Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	5	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan	5	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	6	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Sosial	6	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	7	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan Pemerintahan	7	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	8	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	8	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan</b>		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)</b>					
	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid SDM dan Kebudayaan	1	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid SDM dan Kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100
	2	Pertemuan Trilateral Bappeda, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota	2	Pertemuan Trilateral Bappeda, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
	3	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid SDM dan Kebudayaan	3	Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid SDM dan Kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
	4	Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Tematik Sosial dan Pemerintahan Tahun 2017	1 dokumen	4	Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Tematik Sosial Tahun 2017	1 dokumen	100
	5	Rapat Koordinasi Sinergitas Perencanaan Daerah dan Nasional Tahun 2017	1 dokumen	5	Sinergitas Perencanaan Daerah dan Nasional Tahun 2017	1 dokumen	100
	6	Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan	1 dokumen	6	Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan	1 dokumen	100
	7	FGD Identifikasi Dukungan / Kontribusi Keagamaan terhadap IPM	1 dokumen	7	Identifikasi Dukungan / Kontribusi Keagamaan terhadap IPM	1 dokumen	100
	8	Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017	1 dokumen	8	Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017	1 dokumen	100
				9	Desain Pemetaan Tenaga pendidik	1 dokumen	0
<b>Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan</b>		<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)</b>					
	1	Pertemuan Multilateral SKPD Lingkup Subid Tata Pemerintahan	1 dokumen	1	Pertemuan Multilateral SKPD Lingkup Subid Tata Pemerintahan	1 dokumen	100
	2	Rapat Koordinasi Simplifikasi Regulasi Tahun 2017	2 dokumen	2	Rapat Koordinasi Simplifikasi Regulasi Tahun 2017	2 dokumen	100
	3	Perencanaan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan	1 dokumen	3	Perencanaan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan	1 dokumen	100
	4	Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1 dokumen	4	Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1 dokumen	100
	5	Evaluasi Implementasi Undang - Undang 23 Tahun 2014	1 dokumen	5	Evaluasi Implementasi Undang - Undang 23 Tahun 2014	1 dokumen	100
	6	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Pemerintahan	1 dokumen	6	Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Pemerintahan	1 dokumen	100
	7	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Pemerintahan Tahun 2017	1 dokumen	7	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Pemerintahan Tahun 2017	1 dokumen	100
	8	Penyusunan ISO 9001 : 2015 Untuk Perencanaan Program dan Penganggaran Pembangunan	1 dokumen	8	Penyusunan ISO 9001 : 2015 Untuk Perencanaan Program dan Penganggaran Pembangunan	1 dokumen	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
	9	Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Tematik Pemerintahan Tahun 2017	1 dokumen	9	Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Tematik Pemerintahan Tahun 2017	1 dokumen	100
	10	Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi dan Kabupaten/Kota	3 dokumen	10	Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi dan Kabupaten/Kota	3 dokumen	100
Pengendalian Pembangunan Daerah		Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	100%				
		Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD	100%				
<b>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>		<b>Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan</b>	<b>100%</b>				
	1	Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBD Provinsi Banten	4 dok	1	Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBD Provinsi Banten	4 dok	100
	2	Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2016	1 dok	2	Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2016	1 dok	99
	3	Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2017	2 dok	3	Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2017	2 dok	98
	4	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1 dok	4	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1 dok	99
	5	Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Provinsi Banten	4 dok	5	Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Provinsi Banten	4 dok	93
	6	Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBD Kabupaten Kota	2 dok	6	Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBD Kabupaten Kota	2 dok	92
	7	Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Kabupaten Kota	4 dok	7	Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Kabupaten Kota	4 dok	93
	8	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016	2 dok	8	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016	2 dok	100
	9	Pengendalian Program Pembangunan Sumber Dana APBN	2 dok	9	Pengendalian Program Pembangunan Sumber Dana APBN	2 dok	100
	10	Penguatan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Provinsi Banten	3 Software	10	Penguatan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Provinsi Banten	3 Software	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
	1 1	Penyusunan SOP Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 dok	1 1	Penyusunan SOP Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 dok	90
<b>Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah</b>		<b>Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan</b>					
	1	Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan	5 Dokumen	1	Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan	5 Dokumen	84
	2	Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	14 Dokumen	2	Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	14 Dokumen	99
	3	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)	3 Dokumen	3	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)	3 Dokumen	96
Kerjasama Pembangunan Daerah		Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	100%				
<b>Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan</b>		<b>Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>				
	1	Perencanaan dan Pengendalian Kerja Sama Antar Daerah	1 Dokumen	1	Perencanaan dan Pengendalian Kerja Sama Antar Daerah	1 Dokumen	83
	2	Perencanaan Kerja Sama Pendanaan Pembangunan Non APBD	1 Dokumen	2	Perencanaan Kerja Sama Pendanaan Pembangunan Non APBD	1 Dokumen	80
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK		Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)	100%				
<b>Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan</b>							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja		
	1	Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	1	Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	1 Dokumen	90
	2	Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	2	Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1 Dokumen	65
	3	Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Industri Kecil dan Menengah	3	Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Industri Kecil dan Menengah	1 Dokumen	56
	4	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Provinsi Banten	4	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Provinsi Banten	1 Dokumen	87
	5	Kajian Analisa Belanja Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	5	Kajian Analisa Belanja Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	1 Dokumen	80
	6	Kajian Pengembangan Model Penanganan Penyakit Gangguan Jiwa Berbasis Masyarakat	6	Kajian Pengembangan Model Penanganan Penyakit Gangguan Jiwa Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	64
	7	Kajian Koridor Ekonomi Provinsi Banten	7	Kajian Koridor Ekonomi Provinsi Banten	1 Dokumen	79
	8	Kajian Kualitas Belanja Pelayanan Dasar	8	Kajian Kualitas Belanja Pelayanan Dasar	1 Dokumen	88
			9	Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten	1 Dokumen	0
			10	Kajian Relevansi Pendidikan Kejuruan Melalui Strategi Kemitraan SMK Industri di Provinsi Banten	1 Dokumen	67
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>						
	1	Penyusunan Road Map SIDA Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Teknologi Tepat Guna)	1	Penyusunan Roadmap SIDA Provinsi Banten Tahun 2018-2022	1 Dokumen	70.0
	2	Kaji Terap Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif (TTG) untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Miskin	2	Kaji terap Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif (TTG) untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Miskin	1 Dokumen	95.1
	3	Kajian Pembentukan BUMD Provinsi Banten dalam Peningkatan PAD	3			0.0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
			4	Forum Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Melalui Start UP Program, PPBT dan Inkubasi Bisnis	1 Dokumen	1 Dokumen	79
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%					
	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%					
<b>Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset</b>							
	1 Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Akhir Tahun SKPD Bappeda Tahun 2016	1 Dokumen	1	Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Akhir Tahun SKPD Bappeda Tahun 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	2 Penyusunan Laporan Triwulan, Semester dan Prognosis Akuntansi SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	2	Penyusunan Laporan Triwulan, Semester dan Prognosis Akuntansi SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	3 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal	1 Dokumen	3	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	4 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi, Aset dan SP2D Penyerapan Anggaran Kegiatan Pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	4	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi, Aset dan SP2D Penyerapan Anggaran Kegiatan Pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	6 Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	6	Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	7 Penyusunan dan Pelaporan Pajak PPH Pasal 21 Final Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	7	Penyusunan dan Pelaporan Pajak PPH Pasal 21 Final Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	8 Penyusunan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH Pasal 22 dan Pasal 23 Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	8	Penyusunan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH Pasal 22 dan Pasal 23 Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	9 Penyusunan SPT Pajak Pasal 21 Pribadi Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2016	1 Dokumen	9	Penyusunan SPT Pajak Pasal 21 Pribadi Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja		
	10	Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) SKPD Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen	10	Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) SKPD Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen	1 Dokumen	86
<b>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>						
	1	Penyusunan Laporan Kinerja 1 Dokumen	1	Penyusunan Laporan Kinerja 1 Dokumen	1 Dokumen	100
	2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 1 Dokumen	2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 1 Dokumen	1 Dokumen	97
	3	Penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen	3	Penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen	1 Dokumen	65
	4	Penyusunan Pengendalian Evaluasi 1 Dokumen	4	Penyusunan Pengendalian Evaluasi 1 Dokumen	1 Dokumen	100
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100%				
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah 100%				
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100%				
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian 100%				
<b>Pengadaan Sarana Prasarana Kantor</b>						
	1	Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda 4 Berpenumpang 15 30 Orang) 2000 cc 1 unit	1	Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda 4 Berpenumpang 15 30 Orang) 2000 cc 1 unit	1 unit	90
	2	Belanja Modal Pengadaan Meubelair 4 Paket	2	Belanja Modal Pengadaan Meubelair 4 Paket	4 Paket	91
	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3 Paket	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3 Paket	3 Paket	86
	4	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 5 unit	4	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 5 unit	5 unit	87
	5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1 Paket	5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1 Paket	1 Paket	60

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%		
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja				
	6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3 Paket	6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3 Paket	3 Paket	91
	7	Belanja Modal Videotron	1 Paket	7	Belanja Modal Videotron	1 Paket	1 Paket	92
	8	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	2 Paket	8	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	2 Paket	2 Paket	99
	9	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	1 Paket	9	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	1 Paket	1 Paket	2
	10	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	1 Paket	10	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	1 Paket	1 Paket	78
	11	Cetak dan Penggandaan	100 Eks	11	Cetak dan Penggandaan	100 Eks	100 Eks	100
	12	Belanja Dekorasi Gedung Bangunan	2 Paket	12	Belanja Dekorasi Gedung Bangunan	2 Paket	2 Paket	93
	13	Belanja Barang Non Kapitalis	9 Unit	13	Belanja Barang Non Kapitalis	9 Unit	9 Unit	26
	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Distilasi	4 Unit	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Reproduksi	4 Unit	4 Unit	0
				15	Belanja Jasa Konsultansi	1 Paket	1 Paket	97
				16	Belanja Peralatan Pemetaan	1 Paket	1 Paket	0
				17 #	Belanja Peralatan Studio	1 Paket	1 Paket	2
<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>								
	1	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 Bulan	1	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 Bulan	12 Bulan	93
	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12 Bulan	98
	3	Pemeliharaan Inventaris Kantor	12 Bulan	3	Pemeliharaan Inventaris Kantor	12 Bulan	12 Bulan	78
<b>Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>								
	1	Penunjang Penguatan Kelembagaan	12 Bulan	1	Penunjang Penguatan Kelembagaan	12 Bulan	12 Bulan	88
	2	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	2	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12 Bulan	91
	3	Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	12 Bulan	3	Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	12 Bulan	12 Bulan	62
	4	Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	4	Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12 Bulan	89
	5	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	5	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	90
	6	Penyediaan BBM	12 Bulan	6	Penyediaan BBM	12 Bulan	12 Bulan	79

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
	7	Promosi dan Publikasi	12 Bulan	7	Promosi dan Publikasi	12 Bulan	99
<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>							
	1	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	75 Orang	1	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	100 Orang	67
	2	Adminitrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	2	Adminitrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	80
	3	Penyusunan Standar SKP	75 Orang	3	Penyusunan Standar SKP	75 Orang	44
<b>Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah</b>							
	1	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 Bulan	1	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 Bulan	77
<b>Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan</b>							
	1	Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	50 Orang	1	Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	50 Orang	74
	2	Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	1 dokumen	2	Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	1 dokumen	76
Statistik;							
Penyediaan Data Pembangunan Daerah							
<b>Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan</b>		<b>Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan</b>					
	1	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1 dokumen	1	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1 dokumen	87
	2	Forum Data Pembangunan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)	1 dokumen	2	Forum Data Pembangunan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)	1 dokumen	92
	3	Juknis Bantuan keuangan Update Data Pelaporan untuk Kab/Kota	1 dokumen	3	Juknis Bantuan keuangan Update Data Pelaporan untuk Kab/Kota	1 dokumen	83
	4	Updating Website Litbang	1 Paket	4	Updating WebsiteLitbang	1 Paket	33
	5	Seminar (Qolloqium) Litbangda (Regional dan Daerah	1 Kegiatan	5	Seminar (Qolloqium) Litbangda (Regional dan Daerah	1 Kegiatan	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	DPA Murni Tahun 2017		DPA Perubahan Tahun 2017		Realisasi	%	
	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja			
	6	Majalah dan jurnal Litbang tahun 2017	2 dokumen	6	Majalah dan jurnal Litbang tahun 2017	2 dokumen	63
	7	Rapat koordinasi Implementasi Hasil Kajian Litbang	1 dokumen	7	Rapat koordinasi Implementasi Hasil Kajian Litbang	1 dokumen	0
<b>Jumlah</b>							

**2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, dijelaskan pada tabel berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
 TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN/ TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	96,700,000
			1 Dokumen	1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP	
			1 Dokumen	2. LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI AKHIR TAHUN SKPD BAPPEDA TAHUN 2016	
			1 Dokumen	3. PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN, SEMESTER DAN PROGNOSIS AKUNTANSI SKPD BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017	
			1 Dokumen	4. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP) PELAKSANAAN ANGGARAN INTERNAL	
			1 Dokumen	5. PENYUSUNAN DOKUMEN REKONSILIASI DAN PENCOCOKAN DATA AKUNTANSI ,ASET DAN SP2D PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN PADA SKPD BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017	
			1 Dokumen	6. PENYUSUNAN DOKUMEN SPP , SPM ,SP2D KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017	
			1 Dokumen	7. PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 21 FINAL BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017	
			1 Dokumen	8. PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ,PPH PASAL 22 DAN PASAL 23 KEGIATAN SKPD BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017	
			1 Dokumen	9. PELAPORAN SPT PAJAK PASAL 21 PRIBADI TAHUNAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016	



		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	8,331,067,400
			12 Bulan		1. Penyediaan Jasa Perkantoran (Operasional Perkantoran)	
			12 Bulan		2. Penyediaan Barang Habis Pakai (ATK)	
			12 Bulan		3. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	
			12 Bulan		4. Penyediaan Bahan Cetak	
			12 Bulan		5. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	
			12 Bulan		6. Penyediaan BBM	
			12 Bulan		7. Promosi dan Publikasi	
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%	6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	172,564,000
			75 Orang		1. Peningkatan Kompetensi Aparatur	
			12 Bulan		2. Adminitrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	
			75 Orang		3. Penyusunan Standar SKP	
				7	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	167,400,000
3.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	50 Orang		1. Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Prov. banten	
			1 Dokumen		2. Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Prov. Banten	
			100%	8	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	4,353,362,500
			12 Bulan		1. Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	
		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100%	9	Penyusunan Dokumen APBD	2,050,034,000
			2 Dokumen		1. Penyusunan Dokumen P-APBD TA 2017 dan APBD TA 2018	
			2 Dokumen		2. Sosialisasi RKA SKPD P-APBD 2017 dan APBD TA 2018	
			1 Dokumen		3. Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD TA 2017	
			1 Dokumen		4. Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD TA 2018	
				10	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	6,837,559,000

			1 Dokumen	1 . Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022	
			1 Dokumen	2 . Rapergub Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018	
			1 Dokumen	3 . Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2017	
			1 Dokumen	4 . Pelatihan dan Penyusunan Data E-MUSRENBANG SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2018	
			43 Dokumen Renja SKPD	5 . Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi Banten Tahun 2018	
			43 Dokumen Renja SKPD	6 . Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Provinsi Banten Tahun 2017	
			43 Dokumen Renstra SKPD	7 . Verifikasi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	
			1 Dokumen	8 . Verifikasi Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018	
			1 Dokumen	9 . Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2018	
			1 Dokumen	10 . Rapergub Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2017	
			2 Dokumen	11 . Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	
			1 Dokumen	12 . Sosialisasi Pergub Juknis Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Banten	
			1 Dokumen	13 . Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017- 2022	
			1 Dokumen	14 . Musrenbang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022	
			1 Dokumen	15 . Penyusunan Pergub Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	
			1 Dokumen	16 . Penyusunan SOP Perencanaan dan Penggangan Pembangunan	
			1 Dokumen	17 . Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab / Kota TA 2018	
			2 Dokumen	18 . Verifikasi DRPK SKPD Provinsi dan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA.2018	
			1 Dokumen	19 . Verifikasi Data E- MUSRENBANG SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2018	
			30 Orang	20 . Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA 2017	
			30 Orang	21 . Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2018	
			1 Dokumen	22 . Pengembangan Aplikasi e- DRPK (e-Planning)	
			8 Dokumen	23 . Evaluasi Rapergub RKPD Kabupaten/Kota	
			1 Dokumen	24 . Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun	

				2019	
			1 Aplikasi	25 Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)	
				<b>1 Perencanaan dan Penganggaran</b>	
				<b>1 Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>450,000,000</b>
			1 Dokumen	1. Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Dunia Usaha Dan Ekonomi Kreatif	
			1 Dokumen	2. Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Dunia Usaha Dan Ekonomi Kreatif	
			1 Dokumen	3. Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	
			1 Dokumen	4. Pengembangan Kawasan Agribisnis	
			1 Dokumen	5. Koordinasi Pengendalian Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	
			1 Dokumen	6. Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Agribisnis Koridor Tol Serang - Panimbang	
			1 Dokumen	7. Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif tahun 2017	
				<b>1 Perencanaan dan Penganggaran</b>	
				<b>2 Pembangunan Infrastruktur Wilayah</b>	<b>725,776,500</b>
			1 DOKUMEN	1. KOORDINASI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	
			2 DOKUMEN	2. SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH DAN NASIONAL TAHUN 2018	
			2 DOKUMEN	3. KOORDINASI PROGRAM AMPL/PPSP	
			5 DOKUMEN	4. PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN MITRA SUB BIDANG PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2017	
			2 DOKUMEN	5. KOORDINASI BIDANG SUMBER DAYA AIR	
				<b>1 Perencanaan dan Penganggaran</b>	
				<b>3 Pembangunan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>633,300,000</b>
			1 Dokumen dokumen	1. PERTEMUAN MULTILATERAL SKPD MITRA LINGKUP SUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL	
			1 Dokumen Dokumen	2. SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH DAN NASIONAL TAHUN 2018	

		1 Dokumen Dokumen	3 . KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA )	
		1 Dokumen Dokumen	4 . KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN	
		1 Dokumen Dokumen	5 . KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL	
		1 Dokumen Dokumen	6 . PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM ( SPM ) BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	
		1 Dokumen Dokumen	7 . PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD MITRA LINGKUP SUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1 Dokumen Dokumen	8 . PERTEMUAN BILATERAL SKPD MITRA LINGKUP KESEJAHTERAAN SOSIAL	
			<b>1</b>	
			<b>4</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan</b>
			.	<b>1,797,200,000</b>
		1 Dokumen	1 . Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	
		1 Dokumen	2 . Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	
		1 Dokumen	3 . Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	
		1 Dokumen	4 . Evaluasi Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 Bidang Perekonomian	
		1 Dokumen	5 . Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	
		1 Dokumen	6 . Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	
		1 Dokumen	7 . Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA)	
		1 Dokumen	8 . Pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten	
		1 Dokumen	9 . Sosialisasi Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten	
		1 Dokumen	10 . Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan Tahun 2017	
			<b>1</b>	
			<b>5</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan</b>
			.	<b>368,810,000</b>
		1 Dokumen	1 . Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	
		1 Dokumen	2 . Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	
		1 Dokumen	3 . Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah	

			1 Dokumen	4 . Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Tematik Perekonomian Tahun 2017	
			1 Dokumen	5 . Penyusunan Penganggaran SPM Bidang Perekonomian	
			1 Dokumen	6 . Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan	
			1 Dokumen	7 . Pengendalian dan Perkembangan KPI	
			1 Dokumen	8 . Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan tahun 2017	
				<b>1 6 . Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika</b>	<b>269,324,000</b>
			1 Dokumen	1 . PERTEMUAN BILATERAL SKPD MITRA LINGKUP SUBID KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			1 Dokumen	2 . PERTEMUAN MULTILATERAL SKPD MITRA LINGKUP SUBID KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			1 Dokumen	3 . KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			1 Dokumen	4 . RAPAT VERIFIKASI RENJA SKPD TAHUN 2018 MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	
			1 Dokumen	5 . PERENCANAAN, PEMANTAPAN DAN PENGINTEGRASIAN PENERAPAN E-GOVERNMENT	
			1 Dokumen	6 . PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN MITRA LINGKUP SUBID KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017	
			1 Aplikasi	7 . PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	
			1 Dokumen	8 . ROADMAP PEMBANGUNAN SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI PROVINSI BANTEN	
				<b>1 7 . Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan</b>	<b>1,276,425,000</b>
			1 Dokumen	1 . Pertemuan Trilateral Bappeda, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota	
			1 Dokumen	2 . Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
			1 Dokumen	3 . Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
			1 Dokumen	4 . Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Sosial dan Pemerintahan Tahun 2017	
			1 Dokumen	5 . Sinergitas Perencanaan Daerah dan Nasional Tahun 2017	

			1 Dokumen Dokumen	6 . Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan		
			1 Dokumen Dokumen	7 . Identifikasi Dukungan / Kontribusi Keagamaan terhadap IPM		
			1 Dokumen Dokumen	8 . Pengendalian Pelaksanan Kegiatan SKPD Mitra Tahun 2017		
			<b>1 8</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan</b>	<b>796,516,000</b>	
			1 Dok	1 . Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Pemerintahan		
			1 Dok	2 . Pertemuan Multilateral SKPD Lingkup Subid Tata Pemerintahan		
			1 Dok	3 . Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Pemerintahan Tahun 2017		
			1 Dok	4 . Evaluasi Implementasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014		
4.	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	100%	<b>1 9</b>	<b>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>	<b>1,804,410,000</b>
			1 Dok	5 . Penyusunan ISO 9001 : 2015 untuk Perencanaan Program dan Penganggaran Pembangunan		
			1 Dok	6 . Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Tematik Pemerintahan Tahun 2017		
			3 Dok	7 . Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi dan Kabupaten/Kota		
			2 Dok	8 . Rapat Koordinasi Simplifikasi Regulasi Tahun 2017		
			1 Dok	9 . Perencanaan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan		
			1 Dok	10 . Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		
			4 Dokumen	1 . Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBD Provinsi Banten		
			1 Dokumen	2 . Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2016		
			2 Dokumen	3 . Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2017		
			1 Dokumen	4 . Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah		
			4 Dokumen	5 . Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Provinsi Banten		
			2 Dokumen	6 . Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBD Kabupaten Kota		

			4 Dokumen	7 . Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Kabupaten Kota	
			2 Dokumen	8 . Pengendalian Program Pembangunan Sumber Dana APBD	
			2 Dokumen	9 . Pengendalian Program Pembangunan Sumber Dana APBN	
			3 Software	10 Penguatan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Provinsi Banten	
			2 Dokumen	11 1 Penyusunan SOP Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				<b>2 0 Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah</b>	<b>1,069,951,000</b>
			5 Dokumen	1 . Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	
			14 Dokumen	2 . Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	
			3 Dokumen	3 . Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)	
5.	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	6 dokumen	<b>2 1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan</b>	<b>736,600,000</b>
			2 Dok	1 . Perencanaan dan Pengendalian Kerja Sama Antar Daerah	
			4 Dok	2 . Perencanaan Kerja Sama Pendanaan Pembangunan Non APBD	
6.	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3	<b>2 2 Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>825,660,000</b>
			1 Dokumen	1 . PERTEMUAN BILATERAL SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			1 Dokumen	2 . PERTEMUAN MULTILATERAL SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			1 Dokumen	3 . KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH	
			1 Dokumen	4 . KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
			1 Dokumen	5 . PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN	
			1 Dokumen	6 . SOSIALISASI REVISI RTRW PROVINSI BANTEN 2010-2030	
			1 Dokumen	7 . PENYUSUNAN TEMATIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS SPASIAL	

7.	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	1 Dokumen	8. RAPAT KOORDINASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI PROVINSI BANTEN	2,760,767,000
			1 Dokumen	9. KOORDINASI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI BANTEN	
			1 Dokumen	10. PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN MITRA LINGKUP SUBSID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017	
			34 Dokumen	2 3 Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan	
			1 Dokumen	1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Provinsi Banten	
			1 Dokumen	2. Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Industri Kecil dan Menengah	
			1 Dokumen	3. Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	
			1 Dokumen	4. Kajian Analisa Belanja Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	
			1 Dokumen	5. Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	
			1 Dokumen	6. Kajian Pengembangan Model Penanganan Penyakit Gangguan Jiwa Berbasis Masyarakat	
			1 Dokumen	7. Kajian Koridor Ekonomi Provinsi Banten	
			1 Dokumen	8. Kajian Kualitas Belanja Pelayanan Dasar	
8.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		1 Dokumen	2 4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	638,620,000
			1 Dokumen	1. Penyusunan Road Map SIDA Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Teknologi Tepat Guna)	
			1 Dokumen	2. Kaji Terap Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif (TTG) untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Miskin	
			1 Dokumen	3. Kajian Pembentukan BUMD Provinsi Banten dalam Peningkatan PAD	

	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket 1 Kegiatan 2 Dokumen 1 Dokumen	2 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 . Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 2 . Forum Profil Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) 3 . Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Untuk Kab/Kota 4 . Updating Website Litbang 5 . Seminar (Qolloqium) Litbangda (Regional dan Daerah) 6 . Majalah dan Jurnal Litbang Tahun 2017 7 . Rapat Koordinasi Impelementasi Hasil Kajian Litbang	1,050,000,000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					<b>43,679,356,400</b>

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2017**

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut . Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran “meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan”.

### 3.1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Provinsi Banten telah ditetapkan 1 (satu) sasaran, 1 (tujuh) Sasaran Strategis (program) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program (Outcome).

Dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) Sasaran strategis (program) pencapaian indikator kinerja pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Persentase pencapaian indikator kinerja (outcome)**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan Ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	15 dok	3 dok	3 dok	100%
2	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan	100%	100%	100%	100%
3	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
		pelaksanaan program pembangunan				
4	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	15 dok	3 dok	3 dok	100%
5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%
		Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	100%	100%
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	100%	100%
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	100%	100%	100%
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepeg	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan Data Pembangunan	Ketersediaan Data dan Informasi	10 dok	2 dok	2 dok	100%

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah	Pembangunan				
8	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan IPTEK	Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%

**Tabel 3.2**  
**PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Program : Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan.						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2017	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah. (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	

Anggaran Program Tahun 2017 : Rp. **825.660.000,00**

Realisasi Program Tahun 2017 : Rp. **795.699.600,00** (96,37%)

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja sebagai berikut :

1. Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
2. Pertemuan Multilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

3. Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah
4. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5. Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten
6. Sosialisasi Revisi RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030
7. Penyusunan Tematik Perencanaan Pembangunan Berbasis Spasial
8. Rapat Koordinasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Banten
9. Rapat Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten
10. Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

**Tabel 3.3**  
**PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Program : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2017
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Anggaran Program Tahun 2017 : Rp. **15.204.944.500,00**

Realisasi Program Tahun 2017 : Rp. **12.952.673.900,00 (82,82%)**

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2018 (1 Dokumen)
2. RKPD Perubahan Tahun 2017 (1 Dokumen)
3. Usulan E-Musrenbangnas SKPD Provinsi Dan Kab/Kota Tahun 2018 (1 Dokumen)
4. Sosialisasi Pergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten (1 Kegiatan)
5. Rancangan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (1 Dokumen)

**Tabel 3.4**  
**PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Program : Pengendalian Pembangunan Daerah.						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2017	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	100,00	100,00	100,00	100,00	

Anggaran Program Tahun 2017 : Rp. **2.874.361.000,00**

Realisasi Program Tahun 2017 : Rp. **2.724.396.000,00 (94,78%)**

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja sebagai berikut :

1. LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2016 (1 Dokumen)
2. PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2017 (1 Dokumen)
3. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (1 Dokumen)
4. Laporan Tahunan Sumber Dana APBN (2 Dokumen)
5. Laporan Tahunan Sumber Dana APBD (2 Dokumen)

6. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (1 Dokumen)

**Tabel 3.5**  
**PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

<b>Program : Kerjasama Pembangunan Daerah.</b>					
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi 2016</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Realisasi 2017</b>
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00

Anggaran Program Tahun 2017 : Rp. **736.600.000,00**

Realisasi Program Tahun 2017 : Rp. **594.870.000,00 (80,76%)**

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Cakupan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pengendalian Kerja Sama Antar Daerah (1 Dokumen)
2. Perencanaan Kerja Sama Pendanaan Pembangunan Non APBD (1 Dokumen)

**Tabel 3.6**  
**PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

<b>Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah.</b>					
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi 2016</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Realisasi 2017</b>
Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Rasio Ketersediaan dokumen penatausahaan,	100,00	100,00		

	Pengendalian dan evaluasi Laporan Keuangan			94,84	98,84
	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	100,00	100,00	100,00	100,00

Anggaran Program Tahun 2017 : Rp. **720.750.000,00**

Realisasi Program Tahun 2017 : Rp. **624.360.000,00 (86,63%)**

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen penatausahaan, Pengendalian dan evaluasi Laporan Keuangan dan indikator kinerja Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Akhir Tahun SKPD Bappeda Tahun 2016
2. Penyusunan Laporan Triwulan, Semester dan Prognosis Akuntansi SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal
4. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi, Aset dan SP2D Penyerapan Anggaran Kegiatan Pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017
5. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017
6. Penyusunan dan Pelaporan Pajak PPH Pasal 21 Final Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017
7. Penyusunan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH Pasal 22 dan Pasal 23 Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017

8. Penyusunan SPT Pajak Pasal 21 Pribadi Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2016
9. Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) SKPD Bappeda Provinsi Banten
10. Penyusunan Laporan Kinerja
11. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
12. Penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Banten
13. Penyusunan Pengendalian Evaluasi

**Tabel 3.7  
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

<b>Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.</b>					
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi 2016</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Realisasi 2017</b>
Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	100,00

Anggaran Program Tahun 2017 : Rp. **18.867.653.900,00**

Realisasi Program Tahun 2017 : Rp. **15.865.832.143,00 (84,09%)**

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan, Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah, Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur, Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda 4 Berpenumpang 15 30 Orang) 2000 cc
2. Belanja Modal Pengadaan Meubelair
3. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
4. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer
5. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
6. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
7. Belanja Modal Videotron
8. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi
9. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
10. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
11. Cetak dan Penggandaan
12. Belanja Dekorasi Gedung Bangunan
13. Belanja Barang Non Kapitalis
14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Distilasi
15. Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
16. Belanja Jasa Konsultasi
17. Belanja Modal Peralatan Pemetaan Ukur
18. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
19. Pemeliharaan Gedung dan Halaman
20. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
21. Pemeliharaan Inventaris Kantor
22. Penunjang Penguatan Kelembagaan
23. Penyediaan Barang Habis Pakai
24. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN

- 25. Penyediaan Bahan Cetak
- 26. Penyediaan Makan dan Minum Kantor
- 27. Penyediaan BBM
- 28. Promosi dan Publikasi
- 29. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten
- 30. Adminitrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten
- 31. Penyusunan Standar SKP
- 32. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
- 33. Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten
- 34. Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

**Tabel 3.8**  
**PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah.					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2017
Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan (Dokumen)	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	100,00	100,00	100,00	100,00

Anggaran Program Tahun 2017 : Rp. **1.005.000.000,00**

Realisasi Program Tahun 2017 : Rp. **735.405.250,00 (70,04%)**

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja sebagai berikut :

1. Data dan Informasi Pembangunan Daerah (3 Dokumen)
2. Data dan Informasi hasil Kajian Litbang (2 Kegiatan)

Tabel 3.9  
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Program : Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK.					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2017
Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan	Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah	100,00	100,00	100,00	100,00

Anggaran Program Tahun 2017 : Rp. **3.399.387.000,00**

Realisasi Program Tahun 2017 : Rp. **2.039.748.000 (60,00%)**

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja sebagai berikut :

1. Kaji Terap Model Pemberdayaan Ekonomi dan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif (TTG) (4 Kegiatan)
2. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Provinsi Banten
3. Kajian Strategis Daerah (4 Dokumen)

### 3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini adalah akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang merupakan perwujudan kewajiban Bappeda Provinsi Banten untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi,

tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas dalam hal ini adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang dalam meminta atau pertanggungjawaban dari rencana yang telah dilaksanakan. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Bappeda Provinsi Banten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.638.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 19.528.155.624,00 atau sebesar 99,44 % sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp. 43.679.356.400,00 telah terealisasi sebesar Rp 35.972.984.893,00 atau sebesar 82,36 % dan realisasi fisik mencapai 95,40%, realisasi fisik Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 pagu kegiatan Rp. 63.317.356.400,00 telah terealisasikan sebesar Rp. 55.501.140.517,00 atau sebesar 87,66% dan realisasi fisik mencapai 96,66%.

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15.  
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN  
BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017**

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dalam rangka pelaksanaan amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa

dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah

Dalam rangka pencapaian pengukuran kinerja baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran sasaran pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih belum maksimal dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi aktif terhadap pembangunan Provinsi Banten;
2. Dalam Perencanaan pengendalian dan evaluasi diantaranya masih belum maksimal dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik internal maupun eksternal dilingkungan Bappeda Provinsi Banten;
3. Pengaturan asset (kendaraan dinas) belum tertib;